

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (Biro HOH) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Utama. Biro HOH mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN dalam menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, melakukan pengelolaan sumber daya manusia, serta memberikan informasi, dokumentasi dan publikasi tentang BSN.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Biro HOH-BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

LAKIP Biro HOH Tahun 2016 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Biro HOH ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional maupun Internasional.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIP Biro HOH, maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Biro HOH.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon II lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja.
3. Menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

A. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro HOH BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

A.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro HOH BSN

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro HOH BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Biro HOH BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal;
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, struktur organisasi Biro HOH BSN terdiri dari :

Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan evaluasi penerapan manajemen mutu internal, serta melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

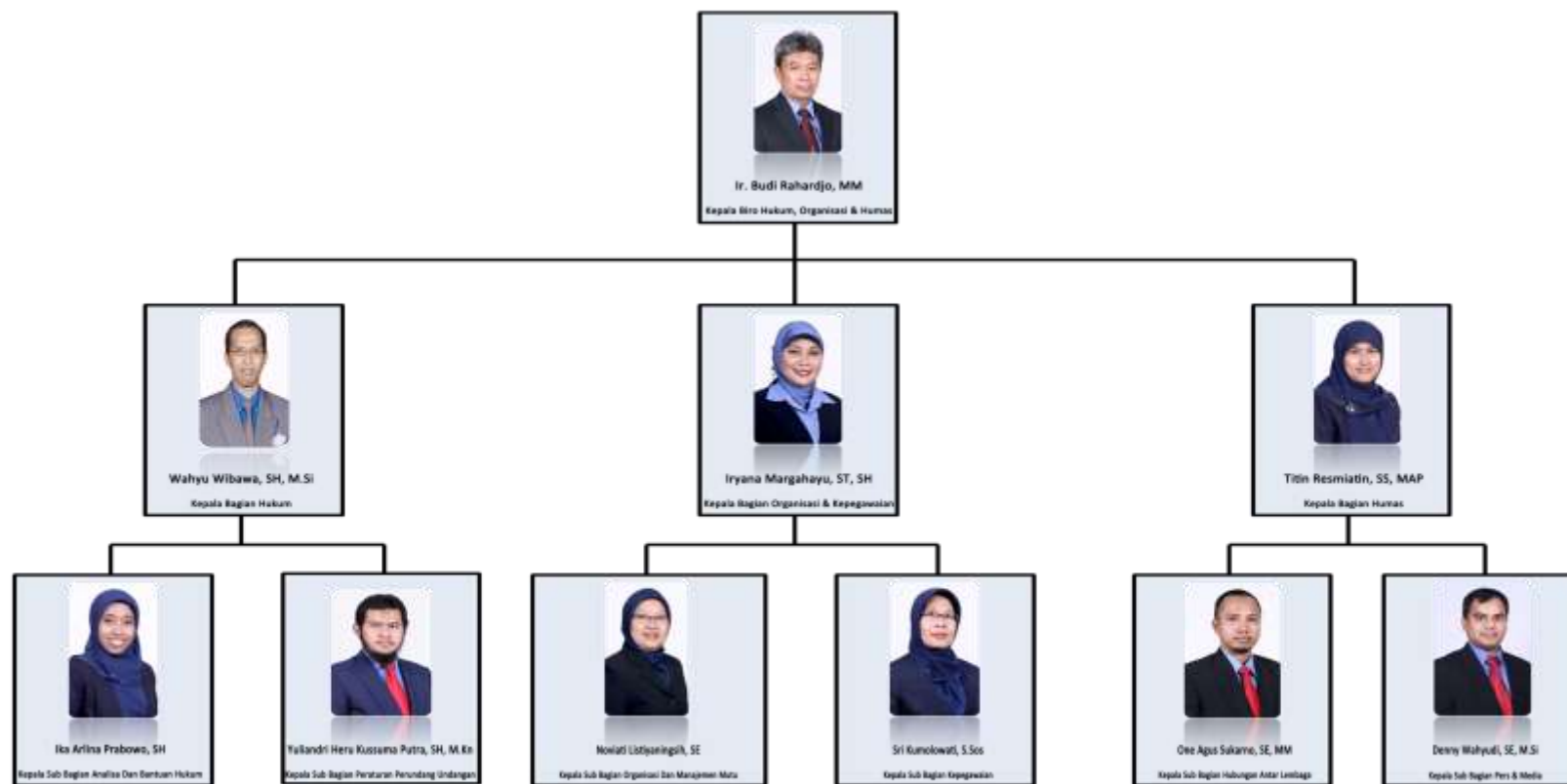
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisa, evaluasi dan perumusan struktur organisasi dan tata laksana;
- b. pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Manajemen Mutu Internal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Humas Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Humas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum, Organisasi dan Humas

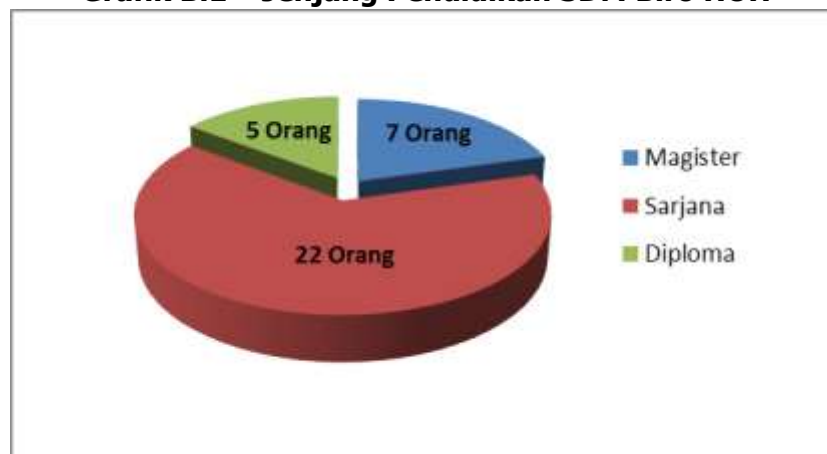
B. Sumber Daya Manusia Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2016 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 33 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel B.1 Pegawai Biro HOH

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro	1
2.	Bagian Hukum	7
3.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	15
4.	Bagian Hubungan Masyarakat	11
Jumlah		34

Grafik B.1 Jenjang Pendidikan SDM Biro HOH



Tabel B.2 Kualifikasi Jabatan dan Kepangkatan berdasarkan Usia

Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Jabatan (Orang)						Fungsional Umum (Orang)
		Eselon II	Eselon III		Eselon IV			
			IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	
56 - 60	1	1						
51 - 55	2				1			1
46 - 50								
41 - 45	4		1	2	3			
36 - 40	5				1			3
31 - 35	5						1	4
26 - 30	13					1		12
20 - 25	4							4

C. PERAN STRATEGIS BIRO HOH BSN

Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kehumasan.

I.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2016 Biro Hukum Organisasi Humas menghadapi tantangan yang cukup besar dengan tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan pada Penetapan kinerja Biro HOH Tahun 2016 antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres No. 8 Tahun 2016 untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 di Kementerian/Lembaga sehingga mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan.
2. Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini disebabkan draft tersebut masih dalam proses penyelesaian akhir dan pamarafan di Sekretariat Negara sebelum ditandatangani Presiden RI.
3. Belum terselesaikannya struktur organisasi BSN yang baru sebagai Implementasi amanah UU No. 20 Tahun 2014. Saat ini masih dalam proses penyusunan draft struktur organisasi BSN yang baru dan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
4. Belum terpenuhinya target penetapan 19 Rancangan Peraturan Kepala BSN. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat draft rancangan Peraturan Kepala BSN yang belum tersusun oleh unit kerja pengusul sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2010-2015, maka Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

Rencana Strategis Biro HOH BSN 2015 - 2019 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI

"Menyediakan SDM Profesional , Informasi aktual kelembagaan dan peraturan Perundang-undangan yang implementatif"

MISI

Merencanakan dan mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan BSN secara transparan dan akuntabel;

2. Memberikan pelayanan prima dibidangi kepegawaian .
3. Memfasilitasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
4. Menyusun peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi;
5. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama stakeholder terhadap BSN;
7. Memperluas jaringan kemitraan yang mendukung pencitraan lembaga.

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

SASARAN

Pada tahun 2016 sasaran Biro HOH BSN adalah :

1. Terwujudnya good governance dan clean.
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum.
3. Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional
4. Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK.
6. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
7. Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional

PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Biro HOH BSN tahun 2016 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
CUSTOMER PERSPECTIVES			
1.	Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75 nilai
		2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,6 Nilai
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	2 PP 2 RPerpres
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES			
3.	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional	4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	77%
		5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 dokumen
		6. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	7 Pedoman
		7. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	85%
		8. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	85%
		9. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	90%
		10. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analis Standardisasi	2 Dokumen
		11. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%
		12. Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala	100%
		13. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFTI)	>95%
4.	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap	14. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
		15. Persentase kegiatan penataan	60%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
	Reformasi Birokrasi	organisasi (restrukturisasi organisasi)	
5.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	16. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	81%
		17. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan	3 Kajian
		18. Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100%
6.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	19. Persentase pemberian bantuan hukum	60%
		20. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	6 Kali
		21. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	75%
7.	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	22. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.100 berita
		23. Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	6 Kali
		24. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	19 Kali
		25. Jumlah Publikasi Kelembagaan	1 Laporan
		26. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	90%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES			
8.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional	27. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN HOH) yang meningkat kompetensinya	100%
		28. Realisasi anggaran HOH	≥ 95%
		29. Jumlah e-gouernance yang mendukung tata kelola HOH	7 Aplikasi
		30. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro HOH BSN menetapkan 8 (delapan) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 5 (Lima) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui :

Penyusunan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu PP tentang standardisasi dan PP tentang penilaian kesesuaian.

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN, dilaksanakan melalui :

- a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,
- b. Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN sesuai analisa kebutuhan,
- d. Publikasi kelembagaan yang berkualitas, dan
- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro HOH BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja.

Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2016 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2016

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N%
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standarisasi dan penilaian kesesuaian				
1.	Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	75,38%	100%
		2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,6	3,2	89%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	2 PP 2 RPerpres	2PP 2 Rperpres	95%
3.	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yg Profesional.	4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	77%	77%	100%
		5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 dokumen	1 Dokumen	50%
		6. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	7 pedoman	7 draft dokumen	80%
		7. Presentase ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	85%	50%	59%
		8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	85%	78%	92%
		9. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	90%	97%	108%
		10. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi	2 Dokumen	1 dokumen	50%
		11. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%	100%	100%
		12. Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala	100%	100%	100%
		13. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit	>95%	>95%	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standarisasi dan penilaian kesesuaian				
		(PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)			
4.	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi	14. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
		15. Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	60%	58%	92%
5.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	16. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	81%	47%	58%
		17. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan	3 Kajian	3 kajian	100%
		18. Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100%	100%	100%
6.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	19. Persentase pemberian bantuan hukum	60%	100%	166%
		20. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	6 Kali	3 Kali	50%
		21. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	75%	10%	13%
7.	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	22. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.100 berita	4.238 berita	385%
		23. Jumlah Pameran standarisasi yang diikuti BSN	6 Kali	10 Kali	167%
		24. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, Pemerintah daerah,	19 Kali	23 Kali	121%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
		serta stakeholder lainnya			
		25. Jumlah Publikasi Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		26. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	90%	90%	100%
8.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional	27. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN HOH) yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%
		28. Realisasi anggaran HOH	≥ 95%	98%	103%
		29. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola HOH	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%
		30. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100%	90%	90%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya good governance dan clean government.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum.
3. Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional.
4. Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK

6. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
7. Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional.

Pencapaian dari tiap – tiap sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government
--------------------------------	---

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	75,38%	100%
b. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,6	3,2	89%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang disampaikan Ketua Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam exit meeting, nilai sementara pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN sebesar 75,38. Namun nilai ini belum final masih akan dibahas dalam rapat pleno evaluator nasional. Jika nilai tersebut tidak berubah, maka target pada Tahun 2016 untuk sasaran pertama telah tercapai.

Sehingga untuk meningkatkan nilai RB BSN, diperlukan rencana aksi dan pelaksanaan yang efektif.

Hasil Index kepuasan pegawai terhadap layanan HOH dari target 3,6 haya mampu mendapatkan realisasi 3,2 atau sebesar 89% ini dikarenakan pelanggan layanan Biro HOH mengingkan SDM yang menangani substansi kompeten dibidagnya sehingga mampu menjawab dan melayani dengan baik. Oleh karena itu ditahun mendatang SDM Biro HOH akan dilakukan diklat untuk meningkatkan komptensinya.

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum
----------------------------	---

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
c. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	2 PP 2 RPerpres	2 PP 2 RPerpres	95%

Tahun 2016 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum ada 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Dan disatu indikator tersebut ada 2 (dua) target capaian yaitu ditetapkannya 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres).

Kedua capaian tersebut menghasilkan 2 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dan tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional yang pada saat ini sedang dalam proses permintaan paraf Menteri dan Kepala LPNK terkait sebelum disahkan oleh Presiden RI yang dikoordinir oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Target terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut tidak dapat tercapai karena lamanya proses pembahasan harmonisasi peraturan yang melibatkan beberapa kementerian terkait di Kementerian Hukum dan HAM.

Target capaian 2 (dua) Rancangan Peraturan presiden (Perpres) yaitu Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional. Sampai akhir tahun 2016 dua dokumen rancangan tersebut telah dapat disusun, namun masih terus dalam pembahasan dengan kementerian PAN dan RB serta kementerian terkait. Secara dokumen, target sudah dapat tercapai, namun secara kualitas belum tercapai 100% karena masih dalam penyempurnaan. Kendala dari pencapaian kualitas capaian ini dikarenakan ketersediaan waktu pembahas yaitu Kedeputusan bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB dikarenakan kesibukan Kedeputusan tersebut dalam

melakukan pembahasan penataan organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia. Banyaknya pembahasan yang dilakukan dengan K/L terkait dengan BSN sesuai amanah UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian juga membuat indikator ini dicapai cukup membutuhkan waktu.

Oleh karena itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2017 Bagian Hukum akan terus berupaya:

- a. Untuk percepatan terbitnya PP SSPKN, Bagian Hukum akan berkoordinasi lebih intens dengan Sekretariat Negara guna penyelesaian tahap akhir yaitu rapat sinkronisasi dan pamarafan draft PP oleh Menteri dan Kepala LPNK terkait.
- b. Untuk percepatan terbitnya PP PNBPN BSN, Bagian Hukum bersama dengan unit internal BSN akan berkoordinasi lebih intens dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara guna penyelesaian tahap akhir yaitu rapat sinkronisasi dan pamarafan draft PP oleh Menteri dan Kepala LPNK terkait.
- c. Melakukan pembahasan-pembahasan intensif dan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kesepakatan dengan K/L dalam penyusunan RPerpres.

SASARAN 3	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional
----------------------------	--

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	77%	77%	100%
5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 dokumen	1 dokumen	50%
6. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	7 pedoman	7 draft dokumen	80%
7. Presentase ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	85%	50%	59%
8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	85%	78%	92%
9. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup	90%	97%	108%

10. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analis Standardisasi	2 Dokumen	1 dokumen	50%
11. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%	100%	100%
12. Persentase pegawai yg mendapatkan	100%	100%	100%
13. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan	>95%	>95%	100%

Tahun 2016 pencapaian sasaran Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional dari 10 (lsepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan target yang tidak mencapai 100% ada 5 (lima) indikator, penyebab dari tidak tercapainya lebih dikarenakan adanya :

1. Kebijakan pemerintah dalam pemotongan anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan seperti contoh dalam melaksanakan kegiatan diklat kepemimpinan, dimana pada Tahun 2016 akan memberangkatkan 8 (delapan) orang namun menjadi 4 (empat) orang yaitu 2(dua) orang Eselon II dan 2(dua) orang Eselon IV.
2. Untuk indikator Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analis Standardisasi. Dari target 2 Dokumen di tahun 2016 yaitu 1) Dokumen Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi, 2) Dokumen Peraturan Menpan RB terkait Jabatan Fungsional Analis Standardisasi. Dokumen yang belum selesai 100% adalah Dokumen Peraturan Menpan RB terkait Analis Standardisasi yang saat ini baru sampai pada tahap uji beban butir-butir kegiatan. Dan tidak tercapainya indikator kinerja diatas dikarenakan adanya perubahan pejabat dan seluruh staf di unit kerja MenPAN RB yang menangani Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sehingga memerlukan waktu bagi pejabat dan tim yang baru untuk mempelajari usulan dan hasil-hasil pembahasan yang telah dilakukan. Disamping itu ketersediaan waktu yang terbatas dari pejabat baru dan tim dalam menangani usulan-usulan Jabatan Fungsional dari K/L lain yang lebih dulu masuk.
3. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian, draft SOP masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Penjelasan capaian setiap indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN dapat dicapai yaitu sebesar 77% (400 pegawai) dari kebutuhan sebanyak 520 pegawai berdasarkan analisis beban kerja. Dikarenakan adanya moratorium penerimaan CPNS selama 2 tahun berturut-turut, diharapkan di tahun 2018 mencapai 520 pegawai.
2. Indikator Kinerja Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 7 dokumen SOP, baru tercapai 80 persen karena 7 (tujuh) dokumen tersebut masih dalam bentuk draft SOP dan perlu pembahasan lebih lanjut.
3. Indikator kinerja Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, belum semua pejabat struktural yang direncanakan mengikuti diklatpim di tahun 2016, capaiannya 59%. Selain adanya penghematan anggaran juga dikarenakan kuota yang tersedia dari penyelenggara diklat hanya untuk 2 Diklatpim II, 1 orang Diklatpim III dan 2 orang Diklatpim IV. Dari alokasi anggaran yang tersedia untuk 9 orang, yang dapat terealisasi hanya 5 orang (55,5%).
4. Indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis, hampir semua ASN BSN telah mengikuti diklat dari target 85% dari jumlah pegawai BSN, 314 pegawai telah mengikuti diklat dari jumlah 400 pegawai.
5. Indikator kinerja Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup, tercapai 107% karena realisasinya tercapai 97 persen dari 90% yang ditargetkan, atau hanya 7 pegawai yg terdapat nilai cukup dari unsur penilaian yang ada. .
6. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi, dari target 2 Dokumen di tahun 2016 yaitu 1) Dokumen Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi, 2) Dokumen Peraturan Menpan RB terkait Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi. Dokumen yang belum selesai 100% adalah Dokumen Peraturan Menpan RB terkait Analisis Standardisasi yang saat ini baru sampai pada tahap uji beban butir-butir kegiatan Penyebab tidak tercapainya target sebagaimana telah disebutkan diatas.
7. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat, penetapan kenaikan pangkat pegawai yang terprogram 2 kali dalam 1 tahun per 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016 dapat tercapat 100%.
8. Indikator Kinerja Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala, dapat tercapai 100%.
9. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dari 9 jabatan fungsional yang sudah aktif di lingkungan BSN, terdapat 19 Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dari 6 jabatan fungsional yang diusulkan antara lain Jabatan Fungsional Peneliti (4), Auditor (3), Analisis Kepegawaian (2), Pustakawan (2), Pranata Komputer(7) dan Widyaiswara (1), 100% sudah diusulkan.

Oleh karena itu pada Tahun 2017 mendatang langkah – langkah yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target diantaranya Koordinasi dan Pembahasan intensif dengan unit kerja dan instansi teknis terkait dimulai sejak awal tahun 2017 sehingga diharapkan target 2016 dapat dicapai pada triwulan pertama tahun 2017.

Sementara itu target pencapaian kinerja yang telah mencapai target 100% Biro Hukum, Organisasi dan Humas (HOH) khususnya bagian organisasi dan kepegawaian akan terus memperbaharui mengingat kebutuhan yang diinginkan seluruh pegawai BSN bersifat dinamis dan terbarukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) ataupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SASARAN 4	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi
----------------------------	---

Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
14. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
15. Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	60%	58%	92%

Tahun 2016 pencapaian sasaran Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dapat mencapai 100%. Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB BSN tahun 2015 telah seluruhnya ditindaklanjuti pada tahun 2016 dan telah dilakukan evaluasi oleh KemenPAN dan RB dan memperoleh nilai 75,38 sesuai target BSN. Kegiatan penataan organisasi BSN juga telah dilaksanakan sebesar 58% pada tahun 2016 dari 60% yang ditargetkan karena hasil pleno dengan Kementerian PAN dan RB serta K/L terkait belum dapat diputuskan persetujuannya. Hal ini

dikarenakan Menteri PAN dan RB berkenan untuk bertemu dengan Kepala BSN secara langsung mengenai tugas pokok dan fungsi BSN. Sehingga diperlukan pembahasan kembali. Capaian 58% diperoleh melalui pembahasan-pembahasan dengan Kementerian PAN & RB dan instansi terkait dengan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sementara itu langkah – langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2017 meningkatkan pencapaian kinerja dari indikator ini adalah :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan dengan lebih efektif dan dilakukan pemantauan secara berkala;
2. Koordinasi dan pembahasan intensif dengan Kementerian PAN dan RB serta instansi terkait agar penataan organisasi BSN dapat segera diselesaikan.

SASARAN 5	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK
----------------------	--

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
16. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	81%	47%	58%
17. Jumlah kajian peraturan perundang -undangan yang diselesaikan	3 Kajian	3 Kajian	100%
18. Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100%	100%	100%

Tahun 2016 pencapaian sasaran Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK indikator kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 ini yaitu 100%, hal ini disebabkan karena :

- a) Kurangnya koordinasi Bagian Hukum dengan unit-unit kerja pengusul di BSN sehingga tidak dapat memenuhi target dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

- b) Belum tersedianya sistem yang baik yang diatur dalam suatu Peraturan Kepala BSN untuk dijadikan acuan dalam membentuk Peraturan Kepala BSN. Sistem tersebut baru berlaku pada bulan November 2016 melalui Perka BSN No 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BSN.
- c) Belum dilaksanakannya tahapan monitoring dan evaluasi oleh Bagian Hukum dalam pembentukan Peraturan Kepala BSN.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2016 pencapaian dari indikator kinerja diatas adalah sebesar 86% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2017 Biro HOH sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan BSN, terutama pembentukan Peraturan Kepala BSN.
- 2) Melakukan evaluasi awal terhadap usulan Rperka BSN dari unit internal BSN.
- 3) Memonitor unit pengusul Rperka BSN untuk mengetahui progres terhadap usulan masing-masing unit kerja BSN.
- 4) meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang diusulkan.
- 5) melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan Perka BSN pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembentukan Perka BSN tahun berikutnya.

SASARAN 6	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
----------------------	--

Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
19. Persentase pemberian bantuan hukum	60%	100%	167%
20. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	6 Kali	3 Kali	50%
21. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	75%	10%	13%

Tahun 2016 pencapaian sasaran Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum untuk ketiga indikator kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 ini yaitu 100%, hal ini disebabkan karena :

- a) Jumlah penyuluhan hukum yang semula direncanakan sebanyak 6 kali, hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali dikarenakan pemotongan anggaran khususnya pada Bagian Hukum melalui Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
- b) Pembuatan dan pengembangan aplikasi JDIH yang baru selesai dilaksanakan pada akhir Tahun 2016. Disamping itu, terdapat kendala keterbatasan infrastruktur pendukung aplikasi antara lain tidak adanya scanner guna menyuplai data *sofcopy* Peraturan Perundangan dan data lainnya untuk updating *database* dokumentasi dan informasi hukum yang diunggah di aplikasi JDIH BSN.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2016 pencapaian dari ketiga indikator kinerja diatas adalah sebesar 77% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2017 Biro HOH sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi dengan baik.

- 2) Melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penghematan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017.
- 3) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PKT, Pusido, perusahaan pengembang aplikasi JDIIH BSN dan Inspektorat.
- 4) Mengajukan permintaan infrastruktur pendukung aplikasi JDIIH ke Biro PKT, antara lain scanner.
- 5) melakukan perencanaan target dan jadwal pengunggahan peraturan dan keputusan kepala BSN serta informasi hukum lainnya yang ditetapkan sekurang-kurangnya pada tahun 2015, 2016, dan 2017.

SASARAN 7	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat
----------------------------	--

Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
22. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.100 berita	4.238 berita	385%
23. Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	6 Kali	10 Kali	167%
24. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	19 Kali	23 Kali	121%
25. Jumlah Publikasi Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
26. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	90%	90%	100%

Tahun 2016 pencapaian sasaran Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan hasil – hasil BSN Kepada Masyarakat untuk kelima indikator kinerjanya keseluruhannya melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 ini yaitu diatas 100%.

Pencapaian yang melampaui target 100% dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yang terbesar adalah keberhasilan Humas BSN dalam menjalankan *partnership strategic* dengan beberapa mitra stakeholder BSN, sehingga kegiatan pemberitaan, pameran, maupun hubungan antar lembaga mendapatkan dukungan

dari berbagai pihak. Dukungan ini sangat bermanfaat bagi pencapaian kinerja Humas BSN di tengah kebijakan pemerintah pemotongan anggaran yang angkanya cukup signifikan berpengaruh bagi pelaksanaan program-program kehumasan.

Seperti halnya pemberitaan SNI yang ternyata banyak disuarakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder lainnya. Dengan pemberitaan SNI yang begitu gencar, SNI tersosialisasi kepada masyarakat dan peran BSN semakin diperkukuh dengan artikel-artikel yang seringkali menyebut BSN. Meskipun masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam memberitakan peran BSN -misalnya BSN adalah lembaga sertifikasi, namun kecenderungan dari waktu ke waktu hingga akhir tahun 2016 salah penyebutan mulai berkurang. Tantangan pemberitaan di akhir tahun 2016 adalah munculnya kesamaan nomenklatur singkatan BSN –Badan Siber Nasional dengan BSN-Badan Standardisasi Nasional. Tantangan lain pada pemberitaan BSN adalah berkurangnya dana liputan ke luar kota yang menyebabkan pemberitaan web BSN dan berita lokal di daerah, tidak optimal.

Selain pemberitaan, keberhasilan pelaksanaan pameran juga didukung oleh stakeholder sehingga BSN mendapatkan kesempatan berpameran secara gratis (biaya sewa pameran ditanggung stakeholder). Dukungan stakeholder juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN semakin gencar serta informasinya memencar ke berbagai tempat strategis seperti di Kawasan Puspiptek Serpong, Grand Metropolitan Bekasi, dan yang terakhir pada even Hari Pangan Sedunia di Boyolali –Jawa Tengah. Sinergi dalam berpameran menunjukkan stakeholder mulai membutuhkan BSN untuk mensosialisasikan layanan BSN, informasi mengenai sertifikasi SNI, proses mendapatkan dokumen SNI/standar internasional, berbagai pelatihan standardisasi, dan sebagainya. Kehadiran BSN dalam pameran dinilai stakeholder dapat mendukung stakeholder lain di pameran, seperti pada pameran *Tangerang Global Innovation Forum/TGIF* yang dianggap mendukung para Inovator dalam menghilirkan produk inovasinya, maupun Pameran Hari Konsumen Nasional 2016 yang dianggap mendukung para UKM dalam meraih SNI.

Sementara itu untuk koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/L dan pemerintah daerah melampaui target dikarenakan setelah UU No.20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan keberadaan BSN sudah mulai diketahui banyak pihak sehingga beberapa pemangku kepentingan datang untuk melakukan koordinasi dengan BSN.

Walaupun dari kelima indikator diatas telah mencapai target dan melampaui, Biro HOH yang dalam hal ini Bagian Humas tidak puas diri dan akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2016 pencapaian dari kedua indikator kinerja diatas adalah sebesar 174,6% dari target penetapan 100%.

SASARAN 8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional
----------------------------	---

Tabel III.9 Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Capaian 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
27. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN HOH) yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%
28. Realisasi anggaran HOH	≥ 95%	98%	103%
29. Jumlah e-gouernance yang mendukung tata kelola HOH	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%
30. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100%	90%	90%

Tahun 2016 pencapaian sasaran meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional untuk salah satu indikator kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 ini yaitu 100%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan audit internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di BSN belum dilakukan.

Sementara itu untuk jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Biro HOH tercapai sebanyak 7 (tujuh) aplikasi yang dihitung secara akumulasi dari tahun 2015 yaitu :

1. SJDIIH
2. Aplikasi Presensi
3. Aplikasi Kinerja
4. Aplikasi SMM
5. Aplikasi Dossier
6. Aplikasi Manajemen Jabatan
7. Aplikasi Penilaian 360 derajat

Tahun 2017 Biro HOH berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

1. Pelaksanaan SMM BSN direncanakan akan dilakukan audit. Dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan sistem yang telah ada dan terintegrasi dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait administrasi dan pengelolaan Negara Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tata kelola Biro HOH
2. Membangun aplikasi yang dibutuhkan oleh pegawai dan unit kerja di BSN

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2016 ini Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2016 tanggal 14 Nopember 2015, pagu anggaran Biro HOH BSN sebesar Rp. **5.014.654.000,-** dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2016 adalah sebesar Rp. **4.932.137.015,-** atau sebesar **98%**.

Pagu dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2016

Dalam rupiah

No	Uraian	2016		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	4.273.110.000	4.115.492.352	99%
	a. Produk Hukum	122.224.000	117.234.000	
	b. Terwujudnya Peraturan perundang - undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1.459.176.000	1.442.892.400	
2	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	2.303.254.000	2.289.602.100	99%
	a. Terwujudnya Paket Pengembangan SDM sesuai analis kebutuhan	1.221.507.000	1.200.337.200	
	b. Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	1.081.747.000	1.089.264.900	
3	Bagian Humas	1.130.000.000	1.082.408.515	96%
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	1.130.000.000	1.082.408.515	
	Jumlah	5.014.654.000	4.932.137.015	98%

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2016 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro HOH Tahun 2016 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro HOH BSN Tahun 2016, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.